



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16770
www.bldk.mahkamahagung.go.id, setbldk@mahkamahagung.go.id

Nomor : 382/BLD/HM2.1.1/V/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Menghadiri Sosialisasi
PERMA No. 1 Tahun 2023 Secara
Daring

Bogor, 31 Mei 2024

Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
2. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
3. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
4. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
5. Ketua Pengadilan Tinggi Manado
6. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
7. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
8. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
9. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin
10. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
11. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Dengan hormat,

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Cq Pusat Strategi dan Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI akan melaksanakan Daring kegiatan "Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup untuk Pengadilan Di Wilayah Hukum Indonesia Bagian Tengah" Tahun Anggaran 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, Kami mohon kiranya Bapak/ibu Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Hakim lingkungan dari masing-masing satuan kerja bersedia untuk menjadi Peserta Aktif secara daring dalam kegiatan dimaksud diatas yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin s.d Rabu/10 s.d 12 Juni 2024
Pukul : (Jadwal Kegiatan Terlampir)
Media : Aplikasi Zoom Meeting
Meeting ID : 814 6450 9532
Passcode : Perma1

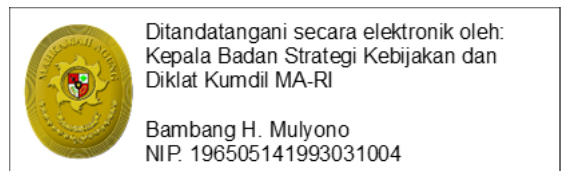
Dalam rangka tertib administrasi, mohon kiranya nama-nama terlampir yang ditugaskan menjadi Peserta Aktif agar membawa Surat Tugas dari instansi masing-masing dan mengisi link <https://bit.ly/zoomperma1> paling lambat 5 Juni 2024.



Apabila terdapat hal yang ingin ditanyakan dapat menghubungi Bapak Endang Suryadi, S.Sos.,M.M melalui nomor kontak 0812-1884-1141 atau Saudara Ronald Marogem Nainggolan.,S.E (Sekretariat) melalui nomor kontak 081-224-289-552.

Dalam memberikan pelayanan, Badan Strategi dan Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui sistem pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung, <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu Kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI;
2. Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI;
3. Plh.Kepala Pusat Strategi dan Kebijakan Diklat Kumdil MA RI; (sebagai laporan)
4. Sekretaris Badan Strategi dan Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan MA RI;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Strategi dan Kebijakan Kumdil MA RI.



LAMPIRAN

Surat Permohonan Peserta Daring Kepala Badan
Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA RI
Nomor : 382/BLD/HM2.1.1/V/2024
Tanggal : 31 Mei 2024

**DAFTAR NAMA PESERTA DARING KEGIATAN SOSIALISASI PERMA No. 1 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM INDONESIA BAGIAN TENGAH.**

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya:

1. Ketua Pengadilan Negeri Jombang
2. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan
3. Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo
4. Ketua Pengadilan Negeri Ngawi
5. Ketua Pengadilan Negeri Magetan
6. Ketua Pengadilan Negeri Madiun
7. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
8. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso
9. Ketua Pengadilan Negeri Sumenep
10. Ketua Pengadilan Negeri Sampang
11. Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan
12. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan
13. Ketua Pengadilan Trenggalek
14. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
15. Ketua Pengadilan Negeri Kab.Kediri
16. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan
17. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro
18. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang
19. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan
20. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo
21. Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan
22. Ketua Pengadilan Negeri Bangil
23. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen
24. Ketua Pengadilan Negeri Malang

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Samarinda:

1. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
2. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong
3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
4. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot



5. Ketua Pengadilan Negeri Bontang
6. Ketua Pengadilan Negeri Sangatta
7. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat
8. Ketua Pengadilan Negeri Penajam

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor
3. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan
4. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan
5. Ketua Pengadilan Negeri Malinau

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin:

1. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin
2. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
3. Ketua Pengadilan Negeri Martapura
4. Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru
5. Ketua Pengadilan Negeri Barabai
6. Ketua Pengadilan Negeri Amuntai
7. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
8. Ketua Pengadilan Negeri Rantau
9. Ketua Pengadilan Negeri Pelihari
10. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan
11. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin
12. Ketua Pengadilan Negeri Paringin

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bitung
2. Ketua Pengadilan Negeri Tondano
3. Ketua Pengadilan Negeri Tahuna
4. Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu
5. Ketua Pengadilan Negeri Arimadidi
6. Ketua Pengadilan Negeri Amurang
7. Ketua Pengadilan Negeri Melonguane

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

1. Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau
2. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka
3. Ketua Pengadilan Negeri Raha



4. Ketua Pengadilan Negeri Unaaha
5. Ketua Pengadilan Negeri Andoolo
6. Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo
7. Ketua Pengadilan Negeri Lususua
8. Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

1. Ketua Pengadilan Negeri Praya
2. Ketua Pengadilan Negeri Selong
3. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
4. Ketua Pengadilan Negeri Dompu
5. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar

1. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa
2. Ketua Pengadilan Negeri Sengkang
3. Ketua Pengadilan Negeri Makale
4. Ketua Pengadilan Negeri Palopo
5. Ketua Pengadilan Negeri Maros
6. Ketua Pengadilan Negeri Watampone
7. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
8. Ketua Pengadilan Negeri Takalar
9. Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto
10. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng
11. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai
12. Ketua Pengadilan Negeri Selayar
13. Ketua Pengadilan Negeri Barru
14. Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene
15. Ketua Pengadilan Negeri Parepare
16. Ketua Pengadilan Negeri Sidrap
17. Ketua Pengadilan Negeri Enrekang
18. Ketua Pengadilan Negeri Masamba
19. Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng
20. Ketua Pengadilan Negeri Pinrang
21. Ketua Pengadilan Negeri Belopa
22. Ketua Pengadilan Negeri Malili

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin:

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak



Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram:

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar:

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Strategi Kebijakan dan
Diklat Kumdil MA-RI

Bambang H. Mulyono
NIP. 196505141993031004



LAMPIRAN

Surat Permohonan Peserta Daring Kepala Badan
Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA RI
Nomor : 382/BLD/HM2.1.1/V/2024
Tanggal : 31 Mei 2024

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN SOSIALISASI SECARA DARING

1. Sebelum sosialisasi daring dimulai, Peserta diharapkan **memastikan kelancaran koneksi jaringan internet** serta berfungsinya perangkat audio- visual yang ada (*speaker, microphone, dan web camera*, baik yang terpisah maupun *built in*) di masing-masing perangkat/ *command center*/ ruang pengadilan satuan kerja.
2. Sebagai pernyataan kehadiran, **Peserta sosialisasi daring wajib mengisi tautan registrasi sebagai berikut:**
<https://bit.ly/zoomperma1>
3. Kegiatan sosialisasi dapat diikuti secara bersama-sama per satuan kerja melalui *command center* masing-masing, dengan demikian registrasi dapat dilakukan per satuan kerja.
4. Peserta diharapkan **mempersiapkan diri 15 menit sebelum dimulai** dan masuk kedalam Zoom tanpa terlambat.
5. Selama sosialisasi daring berlangsung:
 - (1) Peserta wajib menampilkan nama pengadilan asal satuan kerja di nama Zoom, misal: PN Tangerang; PTUN Medan;
 - (2) Satuan Kerja yang mengikuti sosialisasi secara bersama-sama diharapkan dapat mengaktifkan kamera yang menyorot *command center* dan seluruh Peserta;
 - (3) menonaktifkan (*mute*) mikrofon khususnya pada saat Pemateri menyampaikan pemaparan materi. Peserta hanya dapat mengaktifkan (*unmute*) mikrofon setelah mendapatkan kesempatan untuk berbicara pada saat sesi diskusi dan tanya-jawab.
6. Sesi diskusi dan tanya jawab akan diadakan **setelah Pemateri selesai menyampaikan pemaparan materinya**. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Peserta melalui Zoom satuan kerja nya mengangkat tangan dengan tombol *raise hand* yang ada pada fitur *reactions* Zoom. Fasilitator akan memilih Peserta untuk bertanya secara langsung kepada Pemateri.
 - (2) Apabila dalam satuan kerja terdapat lebih dari satu peserta yang hendak mengajukan pertanyaan, satuan kerja menunjuk satu juru bicara untuk menyampaikan semua pertanyaan yang terkumpul secara langsung.
 - (3) Saat menyampaikan pertanyaan secara langsung, Peserta/juru bicara wajib menyampaikan nama serta asal satuan kerjanya.
 - (4) Satuan kerja juga dapat menuliskan pertanyaan yang terkumpul dalam fitur *Chatbox*, kemudian Fasilitator akan memilih pertanyaan yang ditanyakan pada Pemateri.



LAMPIRAN
Surat Permohonan Peserta Daring Kepala Badan
Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA RI
Nomor : 382/BLD/HM2.1.1/V/2024
Tanggal : 31 Mei 2024

SUSUNAN JADWAL KEGIATAN

Waktu		Materi	Pemateri
Hari 1 – Senin, 10 Juni 2024			
14.00 – 23.59 WIB		CHECK IN (Seluruh Peserta)	
19.30 – 20.30 WIB	60	Pembukaan dan Sambutan	<ul style="list-style-type: none">Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H.
20.30 – 21.30 WIB	60	Materi 1 – Ketentuan Umum dan Penomoran Perkara LH	<ul style="list-style-type: none">Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H.
Hari 2 - Selasa, 11 Juni 2024			
08.00 – 09.00 WIB	60	Materi 3 Umum – Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan Hidup (Topik: Pertanggungjawaban Mutlak)	<ul style="list-style-type: none">Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
		Materi 2 TUN – Hak Gugat	<ul style="list-style-type: none">Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
09.00 – 10.00 WIB	60	Materi 3 Umum – Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan Hidup (Topik: Pasal 46 PERMA)	<ul style="list-style-type: none">YM Ketua Kamar Perdata, I. G. Agung Sumanatha, S.H., M.H.Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D.
		Materi 2 TUN – Hak Gugat (Lanjutan)	<ul style="list-style-type: none">Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
10.00 – 10.15 WIB	15	COFFEE BREAK	
10.15 – 12.15 WIB	120	Materi 6 Umum – Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H.Raynaldo Sembiring, S.H., M.Fil.
		Materi 3 TUN – Objek Sengketa, Tuntutan, dan Tenggang Waktu	<ul style="list-style-type: none">Dr. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D.
12.15 – 13.00 WIB	45	ISHOMA	
13.00 – 15.00 WIB	120	Materi 2 Umum – Hak Gugat dan Formalitas Gugatan	<ul style="list-style-type: none">Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H.
		Materi 4 TUN – Pembuktian	<ul style="list-style-type: none">Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.Dr. Disiplin Manao, S.H., M.H.
15.00 – 15.15 WIB	15	COFFEE BREAK	



Waktu	"	Materi	Pemateri
15.15 – 16.15 WIB	60	Materi 4 Umum – Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi	<ul style="list-style-type: none">• Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.• Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D.
		Materi 5 TUN – Pelaksanaan Putusan dan Ketentuan Peralihan	Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.
16.15 – 17.15 WIB	60	Materi 5 Umum – Pembuktian	Perdata: <ul style="list-style-type: none">• Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H. Pidana: <ul style="list-style-type: none">• Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
		Penutupan (Peserta Peradilan TUN)	Koordinator Pokja LHN MA RI
Hari 3 – Rabu, 12 Juni 2024			
08.00 – 10.00 WIB	120	Materi 7 Umum – Eksekusi Putusan Perdata Lingkungan Hidup, Titik Singgung, dan Ketentuan Peralihan	<ul style="list-style-type: none">• Dr. Hamdi, S.H., M.H.• Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.• Sugeng Riyono, S.H., M.H.
10.00 – 10.30 WIB	30	Penutupan (Peserta Peradilan Umum)	<ul style="list-style-type: none">• Koordinator Pokja LHN MA RI
10.30 – 12.00 WIB		CHECK OUT	



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Strategi Kebijakan dan
Diklat Kumdil MA-RI

Bambang H. Mulyono
NIP. 196505141993031004

